

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ragam budaya, adat istiadat dan kebudayaan-kebudayaan lainnya pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia, dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa diberbagai negara. Pengembangan pariwisata di Indonesia pada dasarnya menggunakan konsep pariwisata budaya (*cultural tourism*) seperti telah ditetapkan hal ini dilakukan tentunya dengan pertimbangan bahwa Indonesia memiliki potensi seni dan budaya yang beraneka ragam yang tersebar pada tiap daerah tujuan wisata di Indoensia. Jadi pariwisata yang kita kembangkan adalah parawisata budaya. Dalam hal ini, seni budaya yang beraneka ragam dibeberapa daerah tujuan wisata itu dijadikan sebagai daya tarik utama untuk menarik wisatawan datang berkunjung ke negara kita.

Atas dasar itu, kiranya wajar kalau setiap langkah kita dalam pengembangan pariwisata diharapkan selalu memperhatikan terpeliharanya seni dan budaya bangsa yang dijadikan sebagai aset pariwisata Indonesia. Dengan demikian, perlu ada tanggung jawab moral bagi mereka yang mengambil kebijakan di lapangan untuk selalu menggunakan potensi seni dan budaya yang kita miliki untuk bermacam-macam kegiatan, mulai dari bentuk bangunan, cendra mata, bahan-bahan promosi, makanan dan minuman

terutama dalam penyajiannya.¹ Agar suatu kebudayaan dapat dilestarikan yaitu selalu ada eksistensinya (tidak perlu selalu berarti bentuk-bentuk pernyataanya, maka upaya-upaya yang perlu dijamin kelangsungannya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan).²

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekadar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikamatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui suatu.³

Pemerintah dalam hal ini memiliki peran dan tanggung jawab yang penting demi peningkatan sektor pariwisata. Pemerintah dalam meningkatkan pariwisata, membuat kebijakan-kebijakan yang banyak membantu

¹ Oka A. Yoeh, et.all, *Pariwisata Budaya Masalah Dan Solusinya*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2006, Hlm. 1

² *Ibid*, Hlm. 21

³ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Parawisata*, Yogyakarta : ANDI, 2004, Hlm. 3

perkembangan pariwisata itu sendiri, supaya berkurang pihak yang tidak bertanggung jawab.⁴

Daerah Kabupaten Gorontalo memiliki sumber daya alam yang telah dikelola sebagai obyek wisata antara lain⁵:

- Wisata Resort Danau Limboto dalam kawasan terpadu Pentadio Resort serta sumber mata air panas; dan
- Pemandian Taluhu Barakati di Kecamatan Batudaa.

Kekayaan lainnya yang belum dikelola secara optimal diantaranya:

- Pantai Itoduti di Kecamatan Biluhu; dan
- Dan Pantai Taulaa di Kecamatan Bilato.

Sementara yang akan di kembangkan adalah:

- Taman Bawah Laut Luluo Batudaa Pantai.

Selain itu Kabupaten Gorontalo memiliki aset pariwisata yang tidak ternilai berupa obyek wisata yang terdiri dari 10 buah obyek wisata alam, 7 buah obyek wisata sejarah dan obyek wisata buatan 3 buah yaitu

Objek wisata alam :

- Pentadio Resort;
- Pemandian Taluhu Barakati;
- Air Panas Diloniyohu;
- Pantai Taulaa;
- Pantai Itoduti Desa Biluhu Timur;

⁴ Dimas Pramudita, ‘‘ Perencanaan Pariwisata Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kebijakan Pariwisata’’, ([Http://Serpihandalamkertas.blogspot.co.id/2015/01/Perencanaan-Pariwisata-Dantanggung.Html?M-0,2015](http://Serpihandalamkertas.blogspot.co.id/2015/01/Perencanaan-Pariwisata-Dantanggung.Html?M-0,2015), di akses 26 November 2015)

⁵ Dinas Parawisata Budaya Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gorontalo.

- Danau limboto;
- Goa Ular;
- Cagar Alam tangale;
- Suaka Marga Satwa Hutan Nantu;
- Pantai Toidito Biluhu Timur;
- Bukit PPN.

Objek wisata sejarah :

- Desa Wisata Religi Bongo;
- Desa wisata Budaya Reksonegoro;
- Makam Raja Panipi;
- Museum Soekarno;
- Batu Buaya;
- Batu Babi;
- Rumah Adat Bantayo Poboide.

Objek wisata buatan :

- Pakaya Tower Limboto;
- Arena Pacuan Kuda Dan Lapangan Golf;
- Gelanggang Olahraga 23 Januari.

Dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (c) undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa:

“memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.”

Dalam kenyataannya tentang pelestarian obyek wisata masih banyak obyek-obyek wisata yang secara tidak langsung kita tidak sadari sudah jarang tersentuh oleh pemerintah banyak fasilitas-fasilitas yang sudah rusak dan tidak terpakai lagi padahal banyak cara untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang sudah rusak untuk dipergunakan kembali oleh wisatawan atau masyarakat lokal. Seharusnya obyek wisata ini menjadi suatu tolak ukur atau sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun international yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah itu sendiri.

Agar kebudayaan dapat terlestarikan, yaitu selalu ada eksistensinya (tidak perlu selalu berarti bentuk-bentuk pernyataannya), maka upaya-upaya yang perlu dijamin kelangsungannya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

- Perlindungan meliputi upaya- upaya untuk menjaga agar hasil-hasil budaya tidak hilang atau rusak;
- Pengembangan meliputi pengolahan yang menghasilkan peningkatan mutu atau perluasan khazanah;
- Pemanfaatan meliputi upaya-upaya untuk menggunakan hasil-hasil budaya untuk berbagi keperluan, seperti untuk menekankan citra identitas suatu bangsa, untuk pendidikan kesadaran budaya (baik melalui proses internalisasi maupun apresiasi multicultural), untuk dijadikan muatan industri budaya, dan untuk dijadikan daya tarik wisata.⁶

⁶ Op.cit, Oka A. Yoeti, hlm. 21

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebudayaan merupakan suatu entitas yang otonom dalam kehidupan umat manusia, yang mempunyai sistem yang otonom dalam kehidupan umat manusia, yang mempunyai sistem, mekanisme, serta tujuan-tujuan pada dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dibalik masalah yang terjadi diatas maka calon peneliti mengangkat persoalan terkait peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam hal memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali. Oleh karena itu, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Objek Wisata Di Kabupaten Gorontalo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat oleh peneliti adalah:

- 1.2.1 Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, terkait pengembangan dan pelestarian objek wisata?
- 1.2.2 Apa Saja Faktor Penghambat Pengembangan dan Pelestarian Objek Wisata di Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, terkait pengembangan dan pelestarian objek wisata;

- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pengembangan dan pelestarian objek wisata di Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi akademis maupun praktis yaitu:

- 1.4.1 Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi bagi dunia akademis dibidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam hal pengembangan dan pelestarian objek wisata;
- 1.4.2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah penelitian ini, yaitu pemerintah daerah ketika mengembangkan dan melestarikan objek wisata.